



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DP3APPKB KOTA SALATIGA TAHUN 2023 - 2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA  
TAHUN 2022

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA**

**TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra ini disusun dengan kesadaran penuh akan arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan terhadap capaian tujuan pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan perencanaan yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dokumen Renstra tidak bisa terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat kota berupa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) maupun tingkat provinsi dan pusat. Sejalan dengan reviu internal terhadap tujuan dan sasaran Renstra terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat sejalan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 terdiri dari pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program, rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, penutup dan lampiran. Renstra 2023-2026 ini merupakan proses pembangunan empat tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Semoga dengan disusunnya Renstra ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik, lebih terarah,

efektif, efisien dan akuntabel guna memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat Kota Salatiga.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA  
KOTA SALATIGA**

**YUNI AMBARWATI, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650607 199203 2 008**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.....	18
2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....</b>	<b>27</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.....	31
3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian .....	35
3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	35
3.3.2 Telaahan atas Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 .....	38
3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.....	40
3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.....	43
3.6 Penentuan Isu Strategis .....	46
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	48

4.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga .....	50
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>		<b>51</b>
5.1	Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	51
5.2	Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>		<b>56</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>		<b>91</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>		<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	14
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang .....	14
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Jabatan.....	14
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2021 .....	15
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021.....	19
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021 .....	22
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah DP3APPKB Kota Salatiga.....	29
Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025 .....	32
Tabel 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024.....	36
Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 3.5 Telaah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah .....	41
Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	44
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....	49
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga .....	50
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DP3APPKB Kota Salatiga .....	51
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga .....	53
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....	60
Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026 .....	88
Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	2
---	---

# **BAB I**

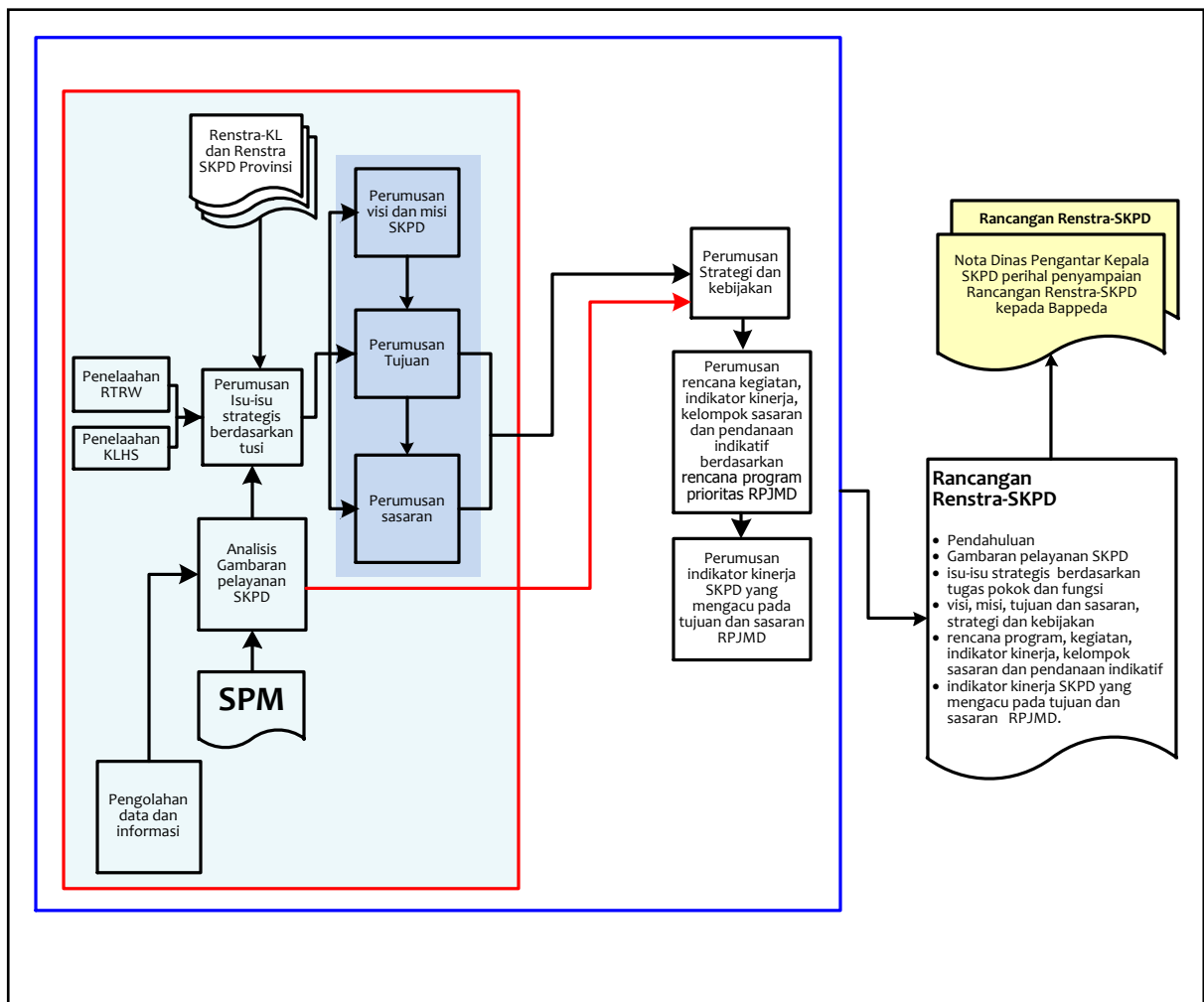
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Renstra DP3APPKB Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP3APPKB setiap tahunnya. Rencana Strategis merupakan suatu proses untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Guna terciptanya akuntabilitas dan peningkatan kinerja yang lebih baik, perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan. Rencana strategis dapat menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan dengan konsisten memfokuskan perhatian pada pencapaian target sasaran yang lebih spesifik.

Penyusunan Renstra DP3APPKB Tahun 2023-2026 berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi dan memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
25. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024;
26. Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024;
27. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

32. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan prioritas-prioritas Pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberikan gambaran kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga dalam mendukung tujuan daerah;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat tahun.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

### **Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

### **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi uraian ringkas tentang Strategi dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.

### **BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi uraian ringkas tentang program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan,
  - b. Sub Bagian Keuangan, dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan, yang membawahi :
  - a. Sub Koordinator Pelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan
  - b. Sub Koordinator Pelindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak, yang membawahi :
  - a. Sub Koordinator Pelindungan Anak, dan
  - b. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, yang membawahi:
  - a. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana, dan
  - b. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi :
  - a. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan kesertaan ber Keluarga Berencana, dan
  - b. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Dinas sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga yaitu :

1. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan terdapat dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsinya, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah,
  - b. menyelenggarakan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui koordinasi lintas sektor berpedoman pada

ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah,

- c. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas,
- d. menyelenggarakan administrasi Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif dinas dilingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat,
- d. pelayanan administratif dinas, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas sekretariat melalui usulan bidang sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan,

- c. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Sekretariat berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan,
- d. menyelenggarakan pelayanan administrative Dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 3. Bidang Pengarus Utama Gender dan Pelindungan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan pelindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, dan sub urusan sistem data gender dan anak dilingkup pelebagaan pengarusutamaan gender serta pelindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pelindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang,
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang, dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengarus Utama Gender dan Pelindungan Perempuan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
- b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### 4. Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak

Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan pelindungan khusus anak di lingkup pelindungan anak serta pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang,
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak sesuai dengan lingkup tugas bidang, dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pelindungan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang melalui usulan seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan daerah,
- b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

#### 5. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan pengendalian penduduk dan sub urusan keluarga berencana dilingkup advokasi, penggerakan dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang,

- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang, dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah,
  - b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan keluarga berencana dan sub urusan keluarga sejahtera dilingkup jaminan dan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana, serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan lingkup tugas Bidang; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan penyusunan kebijakan Daerah;
- b. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3APPKB sebanyak 37 pegawai terhitung sampai pada tanggal 31 Desember 2021 yang terdiri dari table berikut:

#### 1. Kualifikasi Pendidikan

**Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
SD	SMP	SMA/ SMEA/ SKKA	Diploma 2/ Diploma 3/ Dipl 4	Sarjana (S1)	Pasca Sarjana (S-2)	
-	-	5	4	24	4	37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

#### 2. Pangkat dan Golongan Ruang

**Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

Gol I	Gol. II				Gol. III				Gol. IV			Jumlah
I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
-	-	-	2	1	10	5	5	10	2	2	-	Total
-	3				30				4			37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

#### 3. Jenis Jabatan

**Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia DP3APPKB Kota Salatiga Berdasarkan Jenis Jabatan**

Jenis Jabatan				Jumlah
Fungsional	Struktural			
	Es. II	Es. III	Es. IV	
21	1	4	11	37

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, 2021

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga pada tahun 2021 dapat dijabarkan dengan table seperti berikut :

**Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2021**

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
1	Station Wagon	B	1	Unit
2	Station Wagon	KB	3	Unit
3	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	B	1	Unit
4	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	B	4	Unit
5	Pick Up	B	1	Unit
6	Sepeda Motor	B	25	Unit
7	Sepeda Motor	KB	9	Unit
8	Mobil Unit Penerangan	B	1	Unit
9	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	B	1	Unit
10	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	B	6	Unit
11	Lemari Besi/Metal	KB	2	Unit
12	Lemari Kayu	B	12	Unit
13	Lemari Kayu	KB	4	Unit
14	Rak Besi	B	8	Unit
15	Rak Almari	B	7	Unit
16	Rak Almari	KB	1	Unit
17	Filing Cabinet Besi	B	13	Unit
18	Filing Cabinet Besi	KB	1	Unit
19	Brandkas	B	1	Unit
20	Lemari Sorok	B	5	Unit
21	CCTV - Camera Control Television	B	2	Unit
22	Runing Teks Besar	B	1	Unit
23	Runing Teks Kecil	B	1	Unit
24	White Board	B	9	Unit
25	Mesin Absensi	B	2	Unit
26	Lcd Projector/Infocus	B	9	Unit
27	Lcd Projector/Infocus	KB	1	Unit
28	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	B	2	Unit
29	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	KB	1	Unit
30	Focusing Screen/Layar Lcd Projector	B	10	Unit
31	Lcd Projector/Infocus + Focusing Screen/Layar Lcd	KB	1	Unit
32	Meja Rapat	B	21	Unit
33	Meja Rapat	KB	1	Unit
34	Meja Telepon	B	1	Unit
35	Mimbar/Podium	B	1	Unit
36	Meja Resepsionis	KB	1	Unit
37	Meja Resepsionis	B	1	Unit
38	Meja 1/2 Biro	B	13	Unit
39	Kursi Rapat	B	259	Unit
40	Kursi Rapat	KB	1	Unit
41	Kursi Putar	B	19	Unit
42	Kursi Lipat	B	127	Unit
43	Meja Komputer	B	8	Unit
44	Sofa	B	7	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
45	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	KB	1	Unit
46	Lemari Es	B	1	Unit
47	A.C. Window	B	1	Unit
48	A.C. Split 1 Pk	B	8	Unit
49	A.C. Split	B	11	Unit
50	A.C. Split	KB	1	Unit
51	Kipas Angin	B	11	Unit
52	Kipas Angin	KB	2	Unit
53	Exhause Fan	B	12	Unit
54	Exhause Fan	KB	6	Unit
55	Kompor Gas (Alat Dapur)	B	1	Unit
56	Tabung Gas	B	1	Unit
57	Rak Piring Alumunium	B	1	Unit
58	Thermos Air	B	2	Unit
59	Televisi	B	1	Unit
60	Loudspeaker	B	1	Unit
61	Loudspeaker	KB	3	Unit
62	Sound System	B	1	Unit
63	Wireless	B	7	Unit
64	Wireless	KB	1	Unit
65	Dispenser	B	1	Unit
66	Tempat/Keranjang Sampah	B	2	Unit
67	Alat Pemadam/Portable	B	1	Unit
68	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	2	Unit
69	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	6	Unit
70	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	11	Unit
71	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	13	Unit
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	B	1	Unit
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	KB	2	Unit
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	B	6	Unit
75	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	KB	2	Unit
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B	8	Unit
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B	18	Unit
78	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KB	2	Unit
79	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	KB	1	Unit
80	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	B	2	Unit
81	Lensa Kamera	B	1	Unit
82	Kamera Digital	B	4	Unit
83	Pesawat Telephone	B	3	Unit
84	Faxsimile	B	2	Unit
85	Tablet (Alat Komunikasi)	B	9	Unit
86	Antene Shf Portable	B	1	Unit
87	Genset	B	1	Unit
88	Breast Pump	B	1	Unit
89	Instrument Trolley Stainless	B	2	Unit
90	Tabung Tempat Susu	B	1	Unit
91	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	B	7	Unit
92	P.C Unit	B	29	Unit
93	P.C Unit	KB	11	Unit
94	Lap Top	B	13	Unit
95	Lap Top	KB	2	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
96	Notebook	B	1	Unit
97	Monitor	KB	2	Unit
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	30	Unit
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)	KB	14	Unit
100	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	B	1	Unit
101	Digitizer (Peralatan Personal Komputer)	B	2	Unit
102	Ups (Peralatan Personal Komputer)	B	9	Unit
103	External/ Portable Hardisk	B	5	Unit
104	Modem	B	4	Unit
105	Modem	KB	2	Unit
106	Pallet	B	3	Unit
107	Lemari Besi	B	4	Unit
108	Lemari Besi	KB	1	Unit
109	Lemari Kayu	RB	3	Unit
110	Lemari Kayu	KB	6	Unit
111	Rak Besi	B	1	Unit
112	Rak Besi	KB	2	Unit
113	Filing Cabinet Besi	RB	1	Unit
114	Filing Kabinet	KB	2	Unit
115	Lemari Sorok	B	1	Unit
116	Lemari Sorok	KB	4	Unit
117	Rak Kaca	B	1	Unit
118	White Board	B	2	Unit
119	White Board	KB	2	Unit
120	Teralis	B	29	Unit
121	Meja Besi/Metal	KB	1	Unit
122	Kursi Kayu	KB	1	Unit
123	Kursi Besi / Metal	KB	1	Unit
124	Meja Telepon	B	3	Unit
125	Meja 1/2 Biro	RB	1	Unit
126	Meja 1/2 Biro	KB	1	Unit
127	Meja 1/2 Biro	B	1	Unit
128	Sketsel	B	26	Unit
129	Meja Panjang	B	1	Unit
130	Kursi Tangan	B	2	Unit
131	Kursi Tangan	KB	1	Unit
132	Kursi Lipat	B	86	Unit
133	Meja Komputer	B	3	Unit
134	Vertical Blind Dm 01-7109	B	52	Unit
135	Jam Mekanis	B	9	Unit
136	Jam Elektrik	KB	1	Unit
137	Kipas Angin	B	5	Unit
138	Exhause Fan	B	1	Unit
139	Televisi	KB	1	Unit
140	Speker Aktif Gst	B	1	Unit
141	Speker Aktif Gst	KB	1	Unit
142	Wireles	B	1	Unit
143	Stabilisator	B	2	Unit
144	Gambar Presiden / Wakil Presiden	B	1	Unit
145	Kaca Hias	KB	2	Unit
146	Dispenser	B	2	Unit

No.	Sarana Prasarana	Kondisi	Jumlah	Satuan
147	Vertikal Blind	B	24	Unit
148	Gordyin/Kray/Korden	B	1	Unit
149	Alat Rumah Tangga (Home Use) Lain-Lain	B	32	Unit
150	Galon Air	B	1	Unit
151	Taplak Meja	B	45	Unit
152	Lambang Garuda Pancasila	B	1	Unit
153	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2	Unit
154	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	KB	8	Unit
155	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	1	Unit
156	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	KB	9	Unit
157	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	KB	1	Unit
158	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	B	2	Unit
159	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	KB	7	Unit
160	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	B	8	Unit
161	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KB	1	Unit
162	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2	Unit
163	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	1	Unit
164	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Penjabat Eselon II	B	1	Unit
165	Pesawat Telephone	KB	2	Unit
166	Tabung Tempat Susu	B	1	Unit
167	Thermos Es	B	2	Unit
168	Gas Regulator	B	1	Unit
169	Pointer Presenter	B	2	Unit

Sumber: Laporan Aset DP3APPKB, 2021

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga**

Pada bagian ini menunjukkan tingkat capaian OPD berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya.

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur, untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerja sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Rencana Strategis periode sebelumnya dijabarkan sesuai dengan Tabel 2.5. Sedangkan capaian realisasi anggaran dijabarkan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	84,37	87,5	87,5	90,63	100	84,85	90,91	100	100	100	100,57	103,90	114,29	110,34	100,00
2	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislative	%	28	28	28	32	20	28	28	20	20	20	100,00	100,00	71,43	62,50	100,00
3	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41,34	41,71	41,89	41,89	41,89	-	38,8	63,71	39,62	-	-	93,02	152,09	94,58	-
4	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
5	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	%	2,86	2,86	2,86	2,86	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	105,94	105,94	105,94	105,94	100,00
8	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tingkat capaian KLA (Kota Layak Anak)	Score	400	500	650	675	675	239	606,5	794,95	794,95	-	59,75	121,30	122,30	117,77	-
10	Rasio anak korban kekerasan	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,035	0,00	150,00	100,00	100,00	25,00
11	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standart	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
12	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
13	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100,00
14	Persentase kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan TMMD	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
15	Persentase Posyandu aktif	%	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-	-
16	Rasio akseptor KB baru	%	-	115	115	117	75	-	48,02	79,96	48,11	87,16	-	41,76	69,53	41,12	116,21
17	Cakupan peserta KB aktif	%	-	78	79	80	80	-	109,25	72,88	71,27	71,9	-	140,06	92,25	89,09	89,88
18	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	Rasio	-	1:1	01:01	1:2	1:2	-	2,88:1	2,3:1	2,3:1	2,3:1	-	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn	%	-	2	2	2	2	-	1,5	1,15	1,05	0,92	-	125,00	142,50	147,50	154,00
20	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	-	78	78	80	78	-	79,25	72,88	71,27	71,2	-	101,60	93,44	89,09	91,28
21	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	-	9	9	9	15	-	9,4	12,42	15,34	15	-	95,56	62,00	29,56	100,00
22	Cakupan penyediaan informasi data mikro	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	keluarga di setiap desa/kelurahan																
23	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	-	2,79	2,77	2,65	2,6	-	0,51	0,37	0,67	0,14	-	181,72	186,64	174,72	194,62
24	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	2,15	2,12	1,36		-	0,68	1,18	1,25		-	168,37	144,34	108,09	-
25	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	Rasio	-	1:2	1:2	1:2	1:2	-	1:1,9	1:1	1:1,96	1:2	-	-	98,39	-	100,00
26	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	-	100	100	100	100	-	95,36	100	86,58	89	-	95,36	100,00	86,58	89,00
27	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	-	20	17	15	2	-	29,55	0,84	0,67	-	-	52,25	195,06	195,53	200,00
28	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	-	60	70	80	90	-	58,47	66,67	82,83	-	-	97,45	95,24	103,54	-
29	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	-	77	80	85	87	-	80,78	85,06	75,33	82	-	104,91	106,33	88,62	94,25

\* Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja selama 2018-2020 tampak fluktuatif. Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja perempuan pada tahun 2019. Namun dengan adanya pandemi COVID 19 yang berdampak pada banyaknya unit usaha yang gulung tikar dan perumahan pekerja-pekerja, maka sumbangan perempuan terhadap pendapatan kerja pada tahun 2020 kembali menurun.

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2017-2021**

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>3.695.014.000</b>	<b>3.627.082.000</b>	<b>4.569.608.000</b>	<b>1.597.843.000</b>	-	<b>3.417.460.930</b>	<b>3.286.023.381</b>	<b>3.984.366.036</b>	<b>1.405.484.661</b>	-	<b>92,49</b>	<b>90,60</b>	<b>87,19</b>	<b>87,96</b>	-
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	210.800.000	470.200.000	524.168.000	509.739.000	-	208.234.930	408.164.553	466.102.907	402.244.917	-	98,78	86,81	88,92	78,91	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	109.650.000	280.000.000	221.000.000	260.572.000	-	84.868.550	247.677.948	210.529.029	221.395.594	-	77,40	88,46	95,26	84,97	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	5.175.000	6.500.000	21.000.000	-	-	5.175.000	4.800.000	16.895.000	-	-	100	73,85	80,45	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.000.000	15.000.000	20.000.000	16.000.000	-	9.520.000	14.164.000	19.519.800	15.719.050	-	95,20	94,43	97,60	98,24	-
	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	111.630.000	184.680.000	200.000.000	157.049.000	-	95.920.000	161.254.000	180.448.500	150.438.500	-	85,93	87,32	90,22	95,79	-
	PROGRAM Penguatan Kelembagaan PengarusTamaan Gender dan Anak	165.055.000	241.972.000	240.000.000	109.006.000	-	105.953.500	209.719.850	218.905.000	103.986.000	-	64,19	86,67	91,21	95,39	-
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	112.435.000	40.000.000	210.360.000	419.100.000	-	76.415.600	26.186.200	132.903.500	390.234.000	-	67,96	65,47	63,18	93,11	-
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	644.762.000	466.300.000	366.000.000	78.500.000	-	630.763.850	450.722.200	357.597.600	76.048.400	-	97,83	96,66	97,70	96,88	-
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	53.905.000	-	90.000.000	-	-	49.405.000	-	48.697.000	-	-	91,65	-	54,11	-	-
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	197.541.000	-	-	-	-	195.810.000	-	-	-	-	99,12	-	-	-	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	24.322.000	-	-	-	-	24.046.000	-	-	-	-	98,87	-	-	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT	1.469.739.000	1.476.430.000	1.630.655.000	-	-	1.361.293.500	1.365.636.630	1.509.612.800	-	-	92,62	92,50	92,58	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	580.000.000	446.000.000	1.046.425.000	47.877.000	-	570.055.000	397.698.000	823.154.900	45.418.200	-	98,29	89,17	78,66	94,86	-
2	<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>2.748.640.000</b>	<b>3.322.860.000</b>	<b>3.986.327.000</b>	<b>4.076.397.000</b>	-	<b>2.216.792.811</b>	<b>2.680.978.984</b>	<b>3.594.879.283</b>	<b>3.170.625.276</b>	-	<b>80,65</b>	<b>80,68</b>	<b>90,18</b>	<b>77,78</b>	-
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	245.000.000	366.520.000	425.350.000	393.466.000	-	225.658.484	301.524.813	363.727.196	347.090.601	-	92,11	82,27	85,51	88,21	-
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR	159.150.000	247.360.000	187.255.000	140.623.000	-	118.365.031	216.553.605	150.990.863	132.353.411	-	74,37	87,55	80,63	94,12	-
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	6.975.000	7.750.000	25.150.000	-	-	6.975.000	5.800.000	20.359.800	-	-	100	74,84	80,95	-	-
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000	15.000.000	17.500.000	9.605.000	-	14.995.000	14.521.000	17.500.000	9.325.000	-	99,97	96,81	100	97,08	-
	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	1.260.800.000	1.630.730.000	2.320.872.000	2.677.658.000	-	926.804.246	1.165.945.950	2.092.835.792	1.887.171.523	-	73,51	71,50	90,17	70,48	-
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	109.000.000	84.000.000	90.500.000	41.100.000	-	99.357.100	75.791.100	79.828.600	27.613.400	-	91,15	90,23	88,21	67,19	-
	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	438.500.000	232.500.000	233.250.000	115.625.000	-	405.842.030	194.750.016	213.447.032	105.170.841	-	92,55	83,76	91,51	90,96	-
	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	164.960.000	391.000.000	358.200.000	552.665.000	-	144.945.000	383.972.500	354.105.000	524.345.500	-	87,87	98,20	98,86	94,88	-
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT	51.980.000	53.400.000	53.400.000	13.975.000	-	39.866.500	50.150.000	47.960.000	12.615.000	-	76,70	93,91	89,81	90,27	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI DAN KONSELING KRR	175.285.000	190.000.000	143.000.000	94.245.000	-	139.475.000	173.310.000	131.050.000	91.885.000	-	79,57	91,22	91,64	97,50	-
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	41.330.000	27.000.000	30.250.000	-	-	36.247.000	26.240.000	29.330.000	-	-	87,70	97,19	96,96	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	76.660.000	73.600.000	97.600.000	37.435.000	-	54.272.420	70.695.000	89.755.000	33.055.000	-	70,80	96,05	91,96	88,30	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	3.990.000	1.725.000	3.990.000	-	-	99,75	43,13	99,75	-	-
3	<b>DP3APPKB</b>	-	-	-	-	<b>11.525.693.500</b>	-	-	-	-	<b>9.268.569.096</b>	-	-	-	-	<b>80,42</b>
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	6.393.628.900	-	-	-	-	5.618.459.442	-	-	-	-	87,88
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-	339.727.000	-	-	-	-	318.747.000	-	-	-	-	93,82
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-	-	81.002.000	-	-	-	-	64.364.003	-	-	-	-	79,46
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	-	898.607.000	-	-	-	-	826.765.900	-	-	-	-	92,01
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-	-	71.914.000	-	-	-	-	69.652.000	-	-	-	-	96,85
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	-	46.795.000	-	-	-	-	42.973.000	-	-	-	-	91,83
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-	-	20.223.000	-	-	-	-	17.917.200	-	-	-	-	88,60
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	-	64.434.700	-	-	-	-	56.975.400	-	-	-	-	88,42
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	-	3.526.756.900	-	-	-	-	2.171.163.151	-	-	-	-	61,56
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	-	82.605.000	-	-	-	-	81.552.000	-	-	-	-	98,73

## **2.4 Tantangan, Peluang, Kelebihan dan Kelemahan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Kelebihan**

Kelebihan yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Standar Operasional dan Prosedur yang mencakup penanganan kasus dari pelaporan sampai tahap akhir;
2. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
4. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak.

### **2. Kelemahan**

Kelemahan yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya edukasi tentang peran perempuan dalam bidang politik;
2. Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
3. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan jumlah kelurahan tidak proporsional;
4. Masih belum optimalnya internalisasi edukasi tentang pentingnya ber-KB;
5. Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

### **3. Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak;
2. Adanya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
3. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan kelurahan;

4. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
5. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
6. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
7. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
8. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
9. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
10. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan;
11. Adanya kesadaran bagi Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ikut ber-KB;
12. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-RM) di wilayah.

#### **4. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada empat ahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Kemajuan teknologi yang semakin pesat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya perlindungan anak dari konten pornografi, pelecehan seksual maupun tindak penipuan;
2. Masih banyak ditemukan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan;
3. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga yang berkontribusi dalam penyusunan Sistem Data Gender dan Anak, di mana Sistem Data SIGA Kota Salatiga sendiri baru terbentuk di tahun 2021.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - a. Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata,
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
2. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - a. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
3. Permasalahan terkait Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKB
  - a. Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat.
4. Permasalahan terkait Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,
  - b. Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)
5. Permasalahan terkait Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB
  - a. Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP).
6. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
  - a. Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%,
  - b. Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal *life skill* guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.
  - c. Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga.

7. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak:
  - a. masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan,
  - b. masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak.
8. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
  - a. Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya,
  - b. Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga.

**Tabel 3.1 Identifikasi Masalah DP3APPKB Kota Salatiga**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan belum optimal dalam penanganan sesuai standar	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk memotivasi atau mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik serta masih perlu meningkatkan upaya untuk mengubah <i>mindset</i> patriarkis pada masyarakat
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal <i>life skill</i> guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Masih diperlukan upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan, serta upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Masih diperlukan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut serta cakap dalam penguasaan teknologi untuk menyusun Profil Gender Kota Salatiga
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Masih diperlukan edukasi dan peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Masih diperlukan edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Masih diperlukan SDM yang kompeten dalam bidang tersebut serta cakap dalam penguasaan teknologi informasi
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan</li> <li>• Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan</li> </ul>
2.	Belum terwujudnya kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak	Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak</li> <li>• Kendala teknis dalam pengaturan waktu untuk kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Belum optimalnya pengendalian penduduk untuk mewujudkan Kota Salatiga tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, yang diakibatkan masih rendahnya angka kepesertaan KB ( <i>unmet need</i> ), minat akseptor menggunakan MKJP, lemahnya koordinasi lintas sektor dalam mengangani program KB dan stunting, serta terbatasnya tenaga PLKB	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum adanya konsep sinergi yang sistematis mengenai koordinasi stakeholder lintas sektoral, sehingga koordinasi yang terjadi masih sebatas kasuistik ataupun ketika ada kepentingan antara kedua belah pihak
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan KIE masih sebatas pada pelaksana kader KIE yang diharapkan dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.</li> <li>• Masih diperlukan bentuk media publikasi yang lebih mudah tersebar dan tersampaikan pesannya kepada masyarakat</li> </ul>
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi akses pemasaran hasil produksi
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk kegiatan Tribina dan PIK R/M
		Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Masih diperlukan sosialisasi KB Pria kepada masyarakat karena urusan KB banyak dipandang terkait dengan perempuan.

### **3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025**

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2005-2025 perlu untuk ditelaah mengingat arahan dan amanat regulasi. Adapun tahapan pembangunan dalam RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025, yang terdiri dari :

1. Tahapan Pertama (2005-2009),
2. Tahapan Kedua (2010-2014),
3. Tahapan Ketiga (2015-2019),
4. Tahapan Keempat (2020-2024).

Berdasarkan tahapan tersebut, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 masuk kedalam Tahapan Keempat (Tahun-2020-2024). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DP3APPKB Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 juga masuk di dalam Tahapan Keempat (Tahun 2020-2024).

**Tabel 3.2 Telaah RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025**

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal <i>life skill</i> guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkatkan kompetensinya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan</li> <li>• Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan</li> </ul>	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak</li> <li>• Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah</li> </ul>	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik

No	Sasaran RPJPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
5.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

### **3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian**

#### **3.3.1 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024**

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu “Kemen PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya). Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak,
2. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak,
3. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak,
4. menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional,
5. mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu, dan
6. meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

Perumusan tujuan Kementerian PPPA berdasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak, dan
2. terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

**Tabel 3.3 Telaah Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024**

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal <i>life skill</i> guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkatkan kompetensinya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan</li> </ul> Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak</li> <li>• Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah</li> </ul>	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak

### **3.3.2 Telaahan atas Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen atas Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan guna mendukung Visi, Misi dan Janji Presiden RI Tahun 2020-2024. Visi BKKBN yaitu “Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Guna mewujudkan Visi BKKBN, maka dirumuskan Misi BKKBN sebagai berikut :

1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,
2. menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif,
3. menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup,
4. membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global,
5. memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi,
6. membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Selama periode pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk :

1. mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia,
2. mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

**Tabel 3.4 Telaah Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024**

No	Sasaran RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

### **3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera Tetap Bebas Korupsi, Bebas Nihilisme. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah berdikari dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat dan berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

**Tabel 3.5 Telaah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah**

No	Sasaran RENSTRA Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal <i>life skill</i> guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak</li> <li>Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah</li> </ul>	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkatkan kompetensinya dalam mengelola sarana dan prasarana

No	Sasaran RENSTRA Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan</li> <li>• Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan</li> </ul>	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana
2.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.
3.	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
4.	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
5.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

### **3.5 Telaah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026**

Strategi Pembangunan Daerah Kota Salatiga 2023-2026 dirumuskan dengan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat;
2. Meningkatkan apresiasi seni dalam pelestarian warisan budaya Kota Salatiga;
3. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk;
6. Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga;
7. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
8. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender;
9. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektifitas pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata;
12. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan;
13. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup.

**Tabel 3.6 Telaah RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi terhadap perempuan Kota Salatiga dalam hal pendidikan berpolitik. Pada tahun 2021 anggota legislatif perempuan berjumlah 6 orang atau sebesar 24% dari total jumlah anggota legislatif sebanyak 25 orang, belum bisa memenuhi standar kuota peran perempuan dalam legislatif yaitu sebesar 30%	Masih diperlukan upaya untuk mendorong perempuan agar aktif terlibat dalam pendidikan berpolitik dan masih perlu upaya untuk mengubah mindset patriarki pada masyarakat.	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pendidikan berpolitik melalui organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lain yang mendukung namun tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
		Belum optimalnya sosialisasi, edukasi, pendidikan, pelatihan, pendampingan dan monitoring evaluasi kepada perempuan dalam hal <i>life skill</i> guna mendapatkan pekerjaan ataupun membuka lapangan pekerjaan sendiri.	Kurangnya upaya untuk mendorong pemasaran digital produk-produk yang dihasilkan, terbatasnya bantuan modal usaha bagi perempuan, serta kurangnya upaya untuk meningkatkan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan	Terbukanya kesempatan untuk terlibat dalam pelbagai pelatihan guna memberdayakan perempuan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain serta terbuka peluang untuk memasarkan produk melalui penggunaan gawai
		Belum terbentuknya Profil Gender Kota Salatiga	Kurangnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi	Tersedianya data-data yang mendukung penyusunan profil gender Kota Salatiga
		Penggunaan teknologi guna pelayanan informasi publik belum merata	Terbatasnya SDM yang kompeten dan terampil dalam penguasaan teknologi informasi	Tersedia SDM yang potensial untuk ditingkatkan kompetensinya dalam mengelola sarana dan prasarana
		Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terakomodirnya setiap pelaporan sampai tahap akhir karena tidak ada sarana pemulangan</li> <li>• Belum adanya Rumah Aman untuk tempat perlindungan korban kekerasan</li> </ul>	Tersedia SDM yang kompeten dalam mengelola sarana dan prasarana
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, pada tahun 2021 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan	Kurangnya peringatan terus menerus kepada masyarakat mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak serta keharmonisan keluarga.	Adanya perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan sehingga dapat memberikan ancaman dan juga efek jera bagi orang yang hendak melakukan kekerasan.

No	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak, pada tahun 2021 terdapat 17 kasus kekerasan terhadap anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya edukasi pada orang tua dan masyarakat mengenai UU Perlindungan Anak</li> </ul>	Adanya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan
		Belum optimalnya tingkat capaian skor Kota Layak Anak, pada tahun 2021 dengan target 675 tercapai 607,35 dengan kategori Madya	Kurangnya koordinasi antar OPD dalam mewujudkan bukti-bukti fisik instrumen Kota Layak Anak	Adanya dukungan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layak anak seperti adanya Ruang Bermain Ramah Anak di Taman Tingkir
		Belum optimalnya pembentukan kelembagaan Forum Anak di tingkat kelurahan, sampai pada tahun 2021 kelembagaan Forum Anak di Tingkat Kelurahan yang sudah terbentuk hanya 2 Forum Anak yaitu di Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Blotongan dari 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya publikasi di tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, dan RT mengenai Forum Anak</li> <li>• Kendala teknis dalam pengaturan waktu kegiatan anak karena terbentur jadwal sekolah</li> </ul>	Adanya dukungan masyarakat dalam upaya mendukung Forum Anak
4.	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP).	Belum ada konsep sistematis sebagai upaya pencapaian tujuan bersama	Sudah terbentuk GDPK
		Belum meratanya pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada Pasangan Usia Subur (PUS), Kader maupun masyarakat	Bentuk media sangat kompleks dengan spektrum yang terlalu luas	Sudah tersedia gawai, media sosial, serta videotron dengan pesan yang menarik
		Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi dalam Metode Operasi Pria (MOP)	Kurang terbukanya akses dalam pemasaran produk	Dukungan jaringan kerja dengan OPD terkait; Tingginya minat masyarakat terhadap program UPPKA; Adanya pembinaan kader UPPKA
5.	Mewujudkan keluarga yang mandiri, tenteram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) terutama dalam pemasaran hasil produk,	Kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan Tribina	Tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan Tribina jika ada kegiatan dari OPD KB.
		Belum optimalnya pengembangan kegiatan Tribina dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	Kurangnya informasi bahwa MOP tersebut aman dan tidak menimbulkan efek samping pada pria.	Terus dilakukannya optimalisasi KIE; Adanya pemberian reward kepada pria yang bersedia mengenakan kontrasepsi

### 3.6 Penentuan Isu Strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga masuk di dalam isu strategis keempat Rencana Pembangunan Daerah yaitu **Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah.**

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama baik oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hingga saat ini pemerintahan Kota Salatiga belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya menjalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Salatiga terlihat pada belum optimalnya pelayanan perangkat daerah di berbagai urusan (kesehatan, kecamatan/kelurahan, ketentraman, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perpustakaan, perhubungan, perdagangan, dll.).

Isu yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga adalah pembangunan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak. Di dalamnya termasuk juga pembangunan Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak. Masalah yang perlu diselesaikan saat ini adalah penguatan kelembagaan dalam lingkup pemerintahan demi pemenuhan hak anak. Di dalamnya tercakup penyediaan peraturan dan anggaran daerah, penyediaan lembaga konsultasi keluarga dan lembaga konsultasi kesejahteraan anak, penyediaan sumber daya manusia terlatih, serta penyediaan hak sipil dan kebebasan anak. Berbagai aktivitas penguatan kelembagaan ini harus melibatkan lembaga masyarakat dan

dunia usaha. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka akan sulit mewujudkan Kota Salatiga sebagai daerah yang aman, layak, dan kondusif sebagai tempat tumbuh kembang anak.

Berdasarkan isu strategis yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Implementasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Upaya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Terhadap Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis. Tujuan yang dijabarkan dalam hal ini yaitu tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sasaran yaitu kondisi yang menggambarkan hal ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang dijabarkan dalam hal ini yaitu sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023-2026. Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.1. di bawah ini.

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Pelyanan DP3APKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tahunan				Target Akhir Renstra 2026
					Realisasi 2021	Target 2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender`	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	607,25	680	615	620	625	630	630
			Prosentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29
			Prosentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang tertangani	%	20	20	24	24	24	24	24
			IDG	Nilai	79,08	81,57	80	80,5	81	81,5	81,5
			IPG	Nilai	95,37	97,2	95	95,5	96	96,5	96,5
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	39,66	40	40	40	41	41	41
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	0,18	1,32	1,34	1,32	1,30	1,30	1,30
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,90	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10

Pada tabel di atas, dapat kita lihat terdapat penurunan target kinerja pada tahun 2022 ke tahun 2023. Hal ini dikarenakan nilai target untuk tahun 2022 menggunakan dasar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sedangkan penentuan nilai untuk target kinerja tahun 2023-2026 menggunakan dasar perhitungan realisasi dari Dokumen Perencanaan sebelumnya yaitu realisasi kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

## 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga

**Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan Umum</b>
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, Peningkatan layanan keluarga berencana	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, Penguatan Advokasi dan KIE
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG	
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : (1) KIE penyelenggaraan SIGA; (2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak;(4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait;	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga mendukung Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 nomor 4 (empat) dan nomor 8 (delapan). Guna mendukung Tujuan Tingkat Kota sebagaimana dijelaskan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka dirumuskan beberapa strategi yang harus dilakukan sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut ini.

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi DP3APPKB Kota Salatiga**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui : 1) Meningkatkan kualitas dan mengendalikan kuantitas penduduk, 2) Mengendalikan pertumbuhan penduduk, 3) Melaksanakan Sosialisasi Program KKBP
2.	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan	Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : 1) Percepatan PPRG bagi OPD, 2) Fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG, 3) Meningkatkan Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG.
			Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui : 1) KIE penyelenggaraan SIGA, 2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak, 3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak, 4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait

## **5.2 Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

Guna mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga yang dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) tujuan dan 34 (tiga puluh empat) sasaran, maka dirumuskan arah kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Arah kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 mengacu pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Prioritas Pembangunan Kota Salatiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB dapat dilihat di table di bawah ini.

**Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB Kota Salatiga**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
<p>1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk</p> <p>2.Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender</p>	<p>1.Mengendalikan pertumbuhan penduduk</p> <p>2. Meningkatkan cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan</p>	<p>1.Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan, Meningkatkan kesadaran yang baik pada remaja tentang kesehatan reproduksi, peningkatan layanan keluarga berencana.</p> <p>2.Meningkatkan Pencapaian Kualitas Hidup Perempuan Melalui : (1) Percepatan PPRG bagi OPD; (2) Fasilitas pengembangan kelembagaan PUG; (3) Meningkatkan</p>	<p>Mewujudkan Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Pelayanan Infrastruktur Penanganan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan</p>	<p>Mewujudkan Insan-Yang Sehat Dan Cerdas Menuju Salatiga Yang Bersih, Sehat Dan Berilmu dan Berbudhi Luhur</p>	<p>Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri</p>	<p>Mewujudkan Masyarakat Yang Semakin Sejahtera Menuju Salatiga Makmur Dan Berbagi</p>
			<p><b>Prioritas Pembangunan:</b></p> <p>a. Pemantapan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting;</p> <p>b. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b></p> <p>a. Penurunan gizi buruk difokuskan pada penanganan stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak;</p> <p>b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan peserta KB baru (unmedneed) peningkatan partisipasi KB pria dan pemeliharaan kesehatan reproduksi pada remaja;</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b></p> <p>a. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.</p>	<p><b>Prioritas Pembangunan:</b></p> <p>a. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar;</p> <p>b. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan.</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan			
			2023	2024	2025	2026
		<p>Ketrampilan dan pengembangan usaha perempuan; meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik; dan pengembangan jaringan kelembagaan PUG.</p> <p>Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Anak melalui :</p> <p>(1)KIE penyelenggaraan SIGA;</p> <p>(2) Pembuatan sistem Informasi tentang Data Gender dan Anak; (</p> <p>3) Penyusunan Perwali tentang data gender dan anak; (</p> <p>4) Advokasi tentang pentingnya data gender dan anak bagi OPD dan Stakeholder terkait;</p>		<p>c. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak;</p> <p>d. Akserelasi pemenuhan hak-hak anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPPO, difabel dan anak-anak rentan;</p> <p>e. Penguatan pengarusutamaan gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.</p>		

Berdasarkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, pelaksanaan pelatihan usaha bagi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik;
2. Peningkatan perlindungan dan implementasi hak - hak anak dengan fokus pada KIE, Sosiaslisasi dan Advokasi tentang pemenuhan hak anak;
3. Pengoptimalan data gender pada Sistem Informasi Gender dan Anak sebagai langkah awal gunya penyusunan Profil Gender Kota Salatiga;
4. Pengendalian pertumbuhan penduduk dengan fokus penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, meningkatkan jumlah peserta KB baru, peningkatan penggunaan MKJP, dan Peningkatan Partisipasi KB pria.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama empat tahun diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
  - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **C. Program Perlindungan Perempuan**

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

## **D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

## **E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

## **F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - a. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## **G. Program Perlindungan Khusus Anak**

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **H. Program Pengendalian Penduduk**

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
  - a. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan Informal.
  - b. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.
  - c. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
  - d. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.

#### **I. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja.
  - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal.
  - c. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
  - d. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
  - e. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
  - f. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
  - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
  - b. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
  - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

- c. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP.
  - d. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
  - e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
  - f. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
  - g. Peningkatan Kesertaan KB Pria.
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- a. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.
  - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB.

**J. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - a. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - b. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPKKS).
  - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).
  - e. Advokasi dan Promosi IPK.
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
  - b. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				<b>URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	-	-	-	-	-	<u>9.775.916.800</u>	-	<u>9.929.850.000</u>	-	<u>9.946.650.000</u>	-	<u>9.999.150.000</u>	<u>49.513.383.029</u>
				<b>SEKRETARIAT</b>	-	-	-	-	-	<u>6.294.776.000</u>	-	<u>6.400.160.000</u>	-	<u>6.409.160.000</u>	-	<u>6.426.160.000</u>	<u>31.309.725.629</u>
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	%	<b>85,28</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<u>6.294.776.000</u>	<b>88</b>	<u>6.400.160.000</u>	<b>89</b>	<u>6.409.160.000</u>	<b>90</b>	<u>6.426.160.000</u>	<u>31.309.725.629</u>
				<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	dok	10	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	75.044.000
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi</i>	dok	10	10	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	75.044.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Kinerja SKPD												
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun	1	1	1	5.348.276.000	1	5.420.160.000	1	5.420.160.000	1	5.430.160.000	26.482.657.429
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	37	37	37	5.328.116.000	37	5.400.000.000	37	5.400.000.000	37	5.410.000.000	26.381.857.429
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	1	1	1	20.160.000	1	20.160.000	1	20.160.000	1	20.160.000	100.800.000
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100.000.000
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dok	1	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	100.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun	1	1	1	201.000.000	1	202.000.000	1	204.000.000	1	204.500.000	1.039.064.900
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /	Paket	20	20	20	10.000.000	20	10.500.000	20	11.000.000	20	11.000.000	52.655.950

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	46.000.000	10	46.000.000	10	46.500.000	10	46.500.000	231.765.600
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	10	10	12.000.000	10	12.000.000	10	13.000.000	10	13.000.000	60.056.850
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	14.730.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	6.000.000	26.550.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	653.306.500
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	1	1	463.500.000	1	484.000.000	1	485.000.000	1	485.500.000	2.319.345.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.500.000	21.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	60.000.000	12	60.000.000	12	61.000.000	12	61.000.000	301.000.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	400.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	12	420.000.000	1.997.345.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun	1	1	1	247.000.000	1	259.000.000	1	265.000.000	1	271.000.000	1.293.614.300
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35	35	35	115.000.000	35	120.000.000	35	120.000.000	35	125.000.000	596.437.600
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	5	5	5	80.000.000	5	80.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	417.019.400

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	50	50	15.000.000	50	17.000.000	50	18.000.000	50	18.000.000	82.277.300
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	10	10	10	22.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	117.000.000
				Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	10	10	10	15.000.000	10	17.000.000	10	17.000.000	10	18.000.000	80.880.000
-			-	<b>URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK</b>	-	-	-	-	-	<b>1.068.500.000</b>	-	<b>1.085.000.000</b>	-	<b>1.109.000.000</b>	-	<b>1.125.000.000</b>	<b>5.762.402.800</b>
-	Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak	Meningkatkannya cakupan hak-hak anak, kesetara	Kontribusi Perempuan dalam pendapatan			%	39,66	40	40		40		41		41		-

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	<i>anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender</i>	<i>an dan keberdayaan perempuan</i>															
				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>					<b>158.500.000</b>		<b>159.000.000</b>		<b>161.000.000</b>		<b>163.000.000</b>	<b>796.555.000</b>	
				<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>	<b>%</b>	<b>3,56</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>		<b>3,7</b>		<b>3,8</b>		<b>3,9</b>			
				<b>Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif</b>	<b>%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>	<b>24%</b>		<b>24%</b>		<b>24%</b>		<b>24%</b>			
				<b>Persentase Kelembagaan PUG aktif</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
				<b>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG</b>	<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>			
				<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</i>	<i>tahun</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>22.500.000</b>	<b>1</b>	<b>23.000.000</b>	<b>1</b>	<b>23.000.000</b>	<b>1</b>	<b>25.000.000</b>	<b>110.986.000</b>
				<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan</i>	<i>dok</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>12.500.000</b>	<b>1</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1</b>	<b>14.000.000</b>	<b>65.336.000</b>

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pelaksanaan PUG	Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten / kota												
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	32	32	32	10.000.000	32	10.000.000	32	10.000.000	32	11.000.000	45.650.000
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat	kec	4	4	4	41.000.000	4	41.000.000	4	42.000.000	4	42.000.000	206.761.000
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	dok	1	1	1	41.000.000	1	41.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	206.761.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten / Kota												
				<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan &amp; Pelatihan Keterampilan</i>	<i>bulan</i>	12	12	12	95.000.000	12	95.000.000	12	96.000.000	12	96.000.000	478.808.000
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	70	70	70	95.000.000	70	95.000.000	70	96.000.000	70	96.000.000	478.808.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak</b>	%	-	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	100	16.500.000	74.000.000
				<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Penyusunan Data e Kekerasan &amp; Penyusunan Data SIGA</i>	<i>dok</i>	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	16.500.000	74.000.000
				Penyediaan Data Gender	Jumlah Dokumen	dok	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	1	16.500.000	74.000.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia												
-			<b>Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tertangani</b>			%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		-
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<i>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu</i>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130.000.000</b>	<b>100</b>	<b>73.000.000</b>	<b>100</b>	<b>70.000.000</b>	<b>100</b>	<b>71.000.000</b>	<b>475.590.000</b>
					<b>Rasio Kekerasan terhadap perempuan</b>	%	<b>0,012</b>	<b>15,14</b>	<b>15,14</b>		<b>14,13</b>		<b>14,13</b>		<b>13,12</b>		
				<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Advokasi, Kontribusi &amp; Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan</i>	bulan	12	12	12	130.000.000	15	0	15	0	15	0	261.590.000
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Perangkat Daerah	32	32	32	130.000.000	0	-	0	-	0	-	261.590.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota												
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang tertangani	orang	28	21	-	-	15	73.000.000	15	70.000.000	15	71.000.000	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang	28	21	-	-	15	73.000.000	15	70.000.000	15	71.000.000	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase PKK aktif</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>450.000.000</b>	<b>100</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100</b>	<b>470.000.000</b>	<b>100</b>	<b>480.000.000</b>	<b>2.636.857.000</b>
					<b>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan</b>	%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		<b>50</b>		<b>75</b>		<b>100</b>		
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	bulan	12	12	12	450.000.000	12	460.000.000	12	470.000.000	12	480.000.000	2.636.857.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	laporan	12	12	12	450.000.000	12	460.000.000	12	470.000.000	12	480.000.000	2.636.857.000
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan</b>	%	<b>0,037</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>145.000.000</b>	<b>0,02</b>	<b>205.000.000</b>	<b>0,02</b>	<b>217.000.000</b>	<b>0,02</b>	<b>218.000.000</b>	<b>921.772.800</b>
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Pendidik Sebaya dan Tenaga Pendidik	tahun	1	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	66.000.000	1	66.500.000	322.385.000
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	32	32	32	65.000.000	32	65.000.000	32	66.000.000	32	66.500.000	322.385.000
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang	Perlindungan terhadap anak	tahun	1	1	1	80.000.000	1	140.000.000	1	151.000.000	1	151.500.000	599.387.800

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	11	11	-	-	10	60.000.000	10	70.000.000	10	70.000.000	
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	dok	1	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	81.000.000	1	81.500.000	399.387.800
			<b>Persentase Kelembagaan Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan</b>			%	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>28,57</b>		<b>32,14</b>		<b>35,71</b>		<b>39,29</b>		
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak</b>	%	-	<b>57</b>	<b>59,48</b>	<b>170.000.000</b>	<b>61,77</b>	<b>173.000.000</b>	<b>64,06</b>	<b>175.000.000</b>	<b>66,35</b>	<b>176.500.000</b>	<b>857.628.000</b>

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak	tahun	1	1	1	70.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	1	73.000.000	348.890.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	dok	1	1	1	70.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	1	73.000.000	348.890.000
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	tahun	1	1	1	100.000.000	1	102.000.000	1	103.000.000	1	103.500.000	508.738.000
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	110	110	110	40.000.000	110	41.000.000	110	42.000.000	110	42.000.000	207.140.000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	dok	1	1	1	60.000.000	1	61.000.000	1	61.000.000	1	61.500.000	301.598.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota												
-		-	-	<b>URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	-	-	-	-	<b>2.412.640.800</b>	-	<b>2.444.690.000</b>	-	<b>2.428.490.000</b>	-	<b>2.447.990.000</b>	<b>12.441.254.600</b>	
	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Terkendala Laju Pertumbuhan Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)			%	1,9	2,4	2,4		2,3		2,2		2,1		
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					<b>369.200.000</b>		<b>374.500.000</b>		<b>379.000.000</b>		<b>381.000.000</b>	<b>1.852.985.000</b>	
					Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASVFR)	%	0,92	1,85	1,85		1,8		1,75		1,74		
					Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100		100		100		100		

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					<i>Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun</i>	%	0,39	2,5	2,3		2,1		2		1,8		
					<i>Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)</i>	Tahun	27	21,9	22		22		22,1		22,1		
					<i>Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/ Parameter dan Proyeksi Penduduk)</i>	%	-	53	66		79		90		99		
				<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	<i>Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</i>	tahun	1	1	1	125.400.000	1	127.500.000	1	129.000.000	1	130.000.000	626.665.000
				<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan</i>	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi</i>	Satuan Pendidikan	100	100	100	52.400.000	100	53.000.000	100	53.000.000	100	53.500.000	259.540.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan Informal	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal												
				Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	organisasi	2	2	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.000.000	2	16.500.000	79.150.000
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	laporan	1	1	1	13.000.000	1	13.500.000	1	14.000.000	1	14.000.000	66.975.000
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembanguna	laporan	1	1	1	44.000.000	1	45.000.000	1	46.000.000	1	46.000.000	221.000.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					n Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)												
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/ Kota	tahun	1	1	1	243.800.000	1	247.000.000	1	250.000.000	1	251.000.000	1.226.320.000
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	dokumen	1	1	1	73.000.000	1	73.000.000	1	74.000.000	5	74.500.000	366.880.000
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	laporan	1	1	1	60.800.000	1	61.000.000	1	62.000.000	1	62.500.000	301.640.000
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	dokumen	1	1	1	80.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000	1	82.000.000	405.200.000
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	laporan	1	1	1	30.000.000	1	31.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	152.600.000
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>						<b>1.144.294.500</b>		<b>1.157.500.000</b>		<b>1.163.500.000</b>		<b>1.168.000.000</b>	<b>5.979.597.300</b>

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Rasio akseptor KB baru	%	87,16	70	70		72		73		75		
					Cakupan peserta KB aktif	%	71,9	80	82		83		84		85		
					Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	2,3:1	1:2	1:2		1:2		1:2		1:2		
					Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	71,9	78	78,1		78,2		78,3		78,4		
					Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	14,2	15	14		13		12		11		
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	65,85	25,11	25,93		26,75		27,57		28,39		
					Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	85	87		87		90		90		
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	tahun	1	1	1	452.794.500	1	455.000.000	1	458.000.000	1	461.500.000	2.246.547.500

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	2	2	2	11.654.500	2	12.000.000	2	12.500.000	2	13.000.000	59.749.500
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	1	1	1	50.500.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	52.500.000	251.771.000
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana	unit	4	4	4	77.000.000	4	77.000.000	4	77.500.000	4	78.000.000	379.673.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)												
				Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen	1	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	76.000.000	369.314.000
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBP melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	laporan	1	1	1	68.640.000	1	69.000.000	1	69.000.000	1	70.000.000	339.040.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)												
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	1	1	1	170.000.000	1	171.000.000	1	172.000.000	1	172.000.000	847.000.000
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	tahun	1	1	1	150.000.000	1	160.000.000	1	161.000.000	1	161.000.000	1.020.176.800
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	unit	4	4									246.000.000
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	orang	45	45	45	150.000.000	45	160.000.000	45	161.000.000	45	161.000.000	774.176.800

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Pedesaan (IMP)												
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	tahun	1	1	1	481.500.000	1	482.500.000	1	484.500.000	1	485.500.000	2.412.873.000
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	orang	30	30	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	30	13.500.000	67.500.000
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	923	995	995	400.000.000	995	400.000.000	995	400.000.000	995	400.000.000	2.004.373.000
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan	laporan	1	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	30.000.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Penggunaan MKJP												
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	orang	30	30	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	30	12.000.000	60.000.000
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	orang	30	30	30	10.000.000	30	10.000.000	30	11.000.000	30	11.500.000	49.500.000
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	laporan	1	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.500.000	52.500.000
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	orang	15	11	15	30.000.000	17	30.000.000	19	31.000.000	20	31.000.000	149.000.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	Poktan	4	4	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	300.000.000
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung KB	5	5	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	300.000.000
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>						<b>899.146.300</b>		<b>912.690.000</b>		<b>885.990.000</b>		<b>898.990.000</b>	<b>4.608.672.300</b>
					<b>Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)</b>	<i>rasio</i>	<b>1:2</b>	<b>1:2</b>	<b>1:2</b>		<b>1:2</b>		<b>1:2</b>		<b>1:2</b>		

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					<b>Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)</b>	%	89	90	90		90		90		90		
					<b>Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun</b>	%	0,29	2	1,9		1,8		1,7		1,6		
					<b>Cakupan Kader BKB yang Terlatih</b>	%	66	80	83		85		87		87		
					<b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB</b>	%	82	80	80		80		82		83		
					<b>Persentase Baduta Stunting</b>	%	-	28	26		24		22		19		
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	tahun	1	1	1	823.646.300	1	836.190.000	1	808.990.000	1	821.990.000	4.231.816.300
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan	unit	139	139	139	20.000.000	139	21.000.000	139	21.500.000	139	22.000.000	102.500.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)												
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	45	45	45	738.646.300	45	748.190.000	45	719.990.000	45	731.490.000	3.801.856.300
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi)	laporan	1	1	1	40.000.000	1	41.000.000	1	41.500.000	1	42.000.000	192.219.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
							2021	2022	2023		2024		2025		2026		
									Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
					Keluarga/U PPKS)												
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	1	1	1	25.000.000	1	26.000.000	1	26.000.000	1	26.500.000	122.575.000
				Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	orang	50	50		-		-		-		-	12.666.000
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga	tahun	1	1	1	75.500.000	1	76.500.000	1	77.000.000	1	77.000.000	376.856.000

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN		Target Kinerja Tahunan								Indikasi Pagu Total (4 tahun)
									2023		2024		2025		2026		
							2021	2022	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				Kesejahteraan Keluarga	melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga												
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	organisasi	139	139	139	40.000.000	139	41.000.000	139	41.000.000	139	41.000.000	201.728.000
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	laporan	1	1	1	35.500.000	1	35.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000	175.128.000

**Tabel 6.2 Program, Indikator Program dan Formulasi Renstra DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>FORMULASI</b>
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$= \frac{\text{jmlh ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{jmlh seluruh belanja langsung APBD}} \times 100\%$
		Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	$= \frac{\text{jmlh perempuan anggota legislatif}}{\text{jmlh total anggota legislatif}} \times 100\%$
		Persentase Kelembagaan PUG aktif	$= \frac{\text{jmlh kelembagaan PUG yang aktif}}{\text{jmlh kelembagaan PUG}} \times 100\%$
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	$= \frac{\text{jmlh PD yg melaksanakan PPRG}}{\text{total jmlh PD}} \times 100\%$
2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	$= \frac{\text{jmlh PD yg memiliki data gender\&anak}}{\text{total jmlh PD}} \times 100\%$
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	$= \frac{\text{jml perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan}}{\text{total jmlh perempuan dan anak korban kekerasan yg melapor}} \times 100\%$
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	$= \frac{\text{jmlh perempuan korban kekerasan}}{\text{jmlh penduduk perempuan}} \times 100\%$
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase PKK aktif	$= \frac{\text{jmlh anggota PKK yg aktif}}{\text{jmlh anggota PKK}} \times 100\%$
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	= jml PPKS dari setiap kecamatan
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	$= \frac{\text{jmlh anak korban kekerasan}}{\text{jmlh penduduk usia anak}} \times 100\%$

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	$= \frac{\text{jmlh anak yg terlibat dalam kegiatan anak}}{\text{jmlh anak}} \times 100\%$
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASVFR)	$= \frac{\text{jmlh kelahiran perempuan usia 15 – 19 thn}}{\text{jmlh perempuan usia 15 – 19 thn}} \times 1000$
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	$= \frac{\text{rekap data mikro keluarga desa kelurahan}}{\text{jmlh desa kelurahan}} \times 100\%$
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	$= \frac{\text{jmlh istri Pasangan Usia Subur di bawah 20 thn}}{\text{jmlh Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	= umur di mana median atau 50 persen dari semua wanita kelompok umur 10-49 tahun sudah kawin
		Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	= penyediaan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan yang di-Perdakan
8	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB baru	$= \frac{\text{peserta baru KB}}{\text{perkiraan permintaan masyarakat}} \times 100\%$
		Cakupan peserta KB aktif	$= \frac{\text{jmlh peserta KB aktif}}{\text{jmlh Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	$= \frac{\text{jmlh kelurahan}}{\text{jmlh PLKB}} \times 100\%$
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	$= \frac{\text{jmlh peserta KB aktif}}{\text{jmlh Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	$= \frac{(\text{jmlh ingin anak tunda} + \text{jmlh tidak ingin anak lagi})}{\text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI
		<i>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	$= \frac{\text{jmlh peserta KB aktif MKJP}}{\text{jmlh Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		<i>Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP</i>	$= \frac{\text{jmlh faskes yg melayani KB MKJP}}{\text{jmlh faskes yg terdaftar KB}} \times 100\%$
9	<i>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</i>	<i>Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)</i>	$= \frac{\text{jmlh kelurahan}}{\text{PPKBD pengampu kelurahan tersebut}}$
		<i>Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)</i>	$= \frac{\text{jmlh anak yg tumbuh kembang sesuai dg KKA}}{\text{jmlh anak yg ikut kelompok Bina Keluarga Balita}} \times 100\%$
		<i>Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun</i>	$= \frac{\text{jmlh usia kawin di bawah 21 tahun}}{\text{jmlh Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		<i>Cakupan Kader BKB yang Terlatih</i>	$= \frac{\text{jmlh Kader yg terlatih}}{\text{jmlh Kader BKB}} \times 100\%$
		<i>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB</i>	$= \frac{\text{jmlh anggota Kelompok BKB yg ber - KB}}{\text{jmlh anggota kelompok BKB}} \times 100\%$
		<i>Persentase Baduta Stunting</i>	$= \frac{\text{jmlh baduta stunting}}{\text{jmlh seluruh baduta}} \times 100\%$

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama empat tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2023-2026**

No	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				Realisasi 2021	Target 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	(Jumlah penduduk perempuan yang bekerja / jumlah penduduk pekerja Kota Salatiga) x 100%	%	39,66	40	40	40	41	41	41
2.	Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	(jmlh kelembagaan forum anak / jumlah wilayah administrasi (kota 1, kec 4, kel 23) x 100%	%	25	32,14	28,57	32,14	35,71	39,29	39,29
3.	TFR (Total Fertility Rate)	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>ASFR<sub>i</sub> : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>	%	1,90	2,40	2,40	2,30	2,20	2,10	2,10
4.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	(Jumlah perempuan anggota legislatif kota Salatiga/jumlah anggota legislatif kota Salatiga) x 100%	%	20	20	24	24	24	24	24

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga tahun 2023-2026 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan operasional dan perkembangan organisasi untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode perencanaan.

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Dokumen ini sebagai transisi, dengan masa berlaku tahun 2023-2026 sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Sebelum Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga yang tersusun sesuai dengan visi misi Kepala Daerah yang terpilih dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2023-2026 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

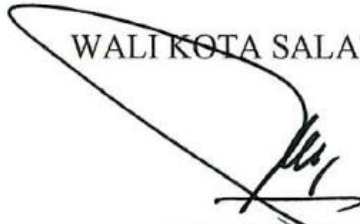
#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan sebagai berikut;

1. Perumusan Renstra akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan melalui proses komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan baik secara *top down* maupun *bottom up approach*;
2. Perencanaan strategis yang telah disusun hendaknya dilaksanakan konsisten dengan situasi kompetisi transparansi yang berlangsung artinya disatu pihak mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai faktor yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi;
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

Kota Salatiga tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun wajib berpedoman pada Renstra Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Salatiga, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga.

WALI KOTA SALATIGA  
  
YULIYANTO